

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMANFAATKAN REZIM INTERNASIONAL (WTO) SEBAGAI PAYUNG PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN AFRIKA SELATAN**

Pada bab ini, penulis menjelaskan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Memanfaatkan Peluang Ekspor ke Pasar Afrika Selatan. Kemudian penulis menjelaskan langkah pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan Afrika Selatan, yang terbagi menjadi sub bab dengan penjelasan secara detil. Adapun poin-poin yang dibahas dilengkapi dengan data statistik yang akurat maupun menjawab rumusan masalah. Upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam merealisasikan kebijakannya adalah memanfaatkan rezim internasional WTO sebagai payung perdagangan dengan Afrika Selatan. Sub bab tersebut berisi tentang Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menentukan Kebijakan di Bidang Ekspor dan keaktifan dalam rezim internasional dengan menggunakan tiga prinsip WTO dalam bekerja sama dengan Afrika Selatan. Adapun Afrika Selatan mempertahankan kerja sama dengan Indonesia dijelaskan secara singkat dan Peluang Indonesia dalam melihat peluang ekspor dijelaskan dengan sudut pandang ekonomi-politik.

Strategi digunakan sebagai tindakan rasional suatu negara untuk bekerja sama dengan negara lain demi mencapai kepentingan nasional. Tindakan ini sudah sewajarnya dilakukan untuk memprediksikan langkah dan kebijakan agar kerja

samayang dijalin membawa keuntungan bagi negara yang bersangkutan. Hal ini merupakan tugas pemerintah untuk merumuskan strategi yang rasional bagi negara sendiri sehingga dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya tanpa merugikan negara lain. Tindakan rasional saling menguntungkan tersebut yang membuat negara lain bertahan dan menambah bentuk kerja sama lain .

Aktor-aktor non-negara seperti WTO (sebelumnya GATT) IMF, dan *World Bank* adalah sistem *Bretton Woods*, dikenal sebagai rezim ekonomi internasional yang dibentuk untuk mengatur alur perdagangan dunia, dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Rezim tersebut diikuti oleh berbagai negara, bahkan hampir semua negara di dunia dengan menggunakan prinsip dan ketentuan yang sama dalam perdagangan internasional. Pandangan aktor dalam memahami isu area merupakan titik awal terbentuknya rezim internasional, sebagai usaha penuntasan masalah dan pemenuhan kepentingan dalam negeri.

Indonesia sejak pertengahan tahun 1980-an telah mengikuti proses pembangunan yang menggantungkan diri di bidang ekspor dan impor dengan mengarahkan dan menampakkan hasilnya pada kepentingan utama ekonomi nasional. Kepentingannya adalah tersedianya pasar makin bebas dan terbuka tergantung pada ekonomi dunia yang makin meningkat, sistem penyelenggaraan perdagangan antar bangsa dan kebijakan pemerintah yang menciptakan iklim yang sehat dan keaktifan dunia usaha mencari dan memanfaatkan peluang yang terbuka oleh perkembangan eksternal dan iklim usaha yang baik. Dalam kaitan dengan sistem penyelenggaraan

perdagangan antar bangsa Indonesia telah berjuang untuk perdamaian dunia, WTO memiliki rangkaian kebijakan di sektor perdagangan khususnya perdagangan luar negeri sebagaimana digariskan dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) 1993 yang telah ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>46</sup> *World Trade Organization* (WTO) atau organisasi perdagangan dunia, merupakan satu-satunya badan Internasional yang mengatur masalah perdagangan antar Negara, tujuan utamanya adalah membuat para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan bisnis. Kegiatan tersebut dapat dijadikan sarana untuk memenuhi kepentingan masing-masing, dalam rangka menumbuhkan tingkat kesejahteraan negara. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan ekspor dan impor, perlindungan pasar dalam negeri dan berkembangnya industri yang berorientasi ekspor dan impor.

Bertolak dari pandangan Morgenthau yang menyatakan bahwa negara tidak akan terlibat dalam rezim apapun, jika rezim tersebut tidak mencerminkan kepentingan nasional masing-masing.<sup>47</sup> Logika tentang kepentingan dianggap sebagai fokus penting untuk memahami ekspektasi aktor, dalam melegitimasi dan mematuhi rezim internasional. Analisis tersebut mengacu pada pandangan neoliberalisme dengan asumsi dasar yang dikembangkan sesuai kenyataan pada sistem internasional. Dalam neoliberalisme, negara dianggap sebagai aktor penting yang rasional dalam memperhitungkan untung-rugi di hubungan internasional. Rasionalitas tersebut

---

<sup>46</sup> Roos Kristina Natalina, Peranan WTO dalam Mengatur Perdagangan Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia, [http://www.researchgate.net/publication/42353928\\_Pembentukan\\_WTO](http://www.researchgate.net/publication/42353928_Pembentukan_WTO) diakses pada 12 Desember 2015

<sup>47</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* 5<sup>th</sup> Edition, McGrae-Hill, New York, 1978 halaman 282

memungkinkan adanya keterlibatan negara dalam rezim internasional dan institusi untuk memperoleh solusi dalam menghadapi isu yang sedang terjadi di dunia. Isu yang terjadi menjadi tantangan suatu negara untuk tetap bertahan dan melindungi serta mencapai kepentingannya secara maksimal. Kepentingan tersebut dapat terwujud apabila negara turut aktif di rezim dan institusi, untuk memperoleh informasi penting yang dapat digunakan dalam menentukan kepentingan bersama. Ketika kepentingan bersama berada dalam prioritas tertinggi diatas kepentingan nasional, maka rezim secara legal dapat memonopoli paksaan fisik terhadap negara anggota untuk mematuhi aturan dan kesepakatan bersama.<sup>48</sup> Sehingga, negara akan saling menjaga dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan demi kepentingan masing-masing.

Kepatuhan di antara anggota tersebut dapat menjadi keuntungan yang dapat dirasakan tiap negara. Kesepakatan yang disetujui dan direncanakan bersama inilah yang menjadi tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan sebagai representasi dari kepentingan nasional. Keuntungan tersebut didapat dan dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dengan sedikit dampak. Pada hal ini, kepentingan bersama menunjukkan karakter masing-masing negara dalam memenuhi keuntungan nasional. Perbedaan tersebut bukan karena keragaman kebudayaan ataupun kondisi geografis saja. Kepentingan membuat karakter yang dimiliki antara negara satu dengan yang lain berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditunjukkan pada sikap patuh dan tidaknya

---

<sup>48</sup> Tedi Bagus, Analisis Kepentingan dalam Rezim Internasional, <http://tedi-bagus-fisip13.web.unair.ac.id> diakses pada 19 November 2015

terhadap aturan-aturan rezim ekonomi internasional. Aturan tersebut menjadi landasan dalam pengambilan keputusan negara untuk kerja sama. Kerja sama dapat menjadi jalan suatu negara untuk memperlebar jangkauannya di pasar internasional.

Untuk membuat negara lain ingin bekerja sama, dibutuhkan citra yang baik dari suatu negara di mata internasional. Baik-buruknya citra akan mempengaruhi pandangan negara lain. Apabila citra negara baik, maka pandangan dunia internasional akan semakin tertuju pada negara yang memiliki sifat tersebut. Sehingga, negara dengan citra baik dan diiringi sikap patuh pada aturan-aturan rezim untuk memperoleh kepentingan, dapat menjadi salah satu cara pemenuhan kebutuhan negara. Peningkatan citra baik suatu negara di bidang perdagangan dapat ditunjukkan melalui keterbukaan dalam peraturan perdagangan seperti menaati prinsip-prinsip yang telah diterapkan WTO.

Setiap negara terkadang masih memiliki tingkat egoisme yang tinggi dan hanya ingin mendapat keuntungan tanpa melihat negara lain akan mengalami kerugian. Bahkan untuk memperoleh keuntungan, negara hingga menghapuskan hambatan-hambatan yang dapat menjadi penyebab kerugian. Penghapusan hambatan bisa menjadi keuntungan yang didapat oleh pihak yang bersangkutan.

Pada kondisi terdesak, negara bersedia melakukan apa saja agar kepentingannya tetap terpenuhi yang terkadang mengakibatkan negara lain mengalami kerugian. Memang kondisi tersebut sudah menjadi sikap negara untuk

mempertahankan keuntungan dan meminimalisir kerugian yang akan dialaminya. Namun ketika sudah berlebihan dan menjadi sikap ketidakpatuhan serta pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan, dapat menimbulkan banyak konflik dan kerugian. Negara yang mengalami kerugian biasanya tidak tinggal diam dengan keadaan tersebut. Inilah yang memicu kerugian yang lebih besar dan menjadi perkara yang justru saling merugikan. Negara yang melanggar akan terkena sanksi dari ringan hingga beratsedangkan negara yang melapor juga terkena dampak yang berakibat tidak terpenuhi kebutuhan negaranya. Sebagai sanksi ringan dapat berupa teguran, yang mempengaruhi citra baik di mata internasional. Selain itu, sanksi didapat dari rezim ekonomi internasional berupa sanksi sedang antara lain embargo dan yang berat dapat berupa pemutusan hubungan kerja sama dengan negara lain. Begitu pula hubungan perekonomian antara Indonesia dan Afrika Selatan. Maka dari itu setiap negara harus bersikap sewajarnya dan tidak mengedepankan egoisme demi kepentingan nasionalnya.

Banyaknya peraturan akan ketertiban tersebut tidak membuat Indonesia mundur. Justru dengan peraturan tegas dan mengikat seluruh negara anggota inilah yang membuat Indonesia tetap optimis menjadi salah satu negara pengikut rezim ekonomi internasional. Keterlibatan Indonesia dalam rezim internasional merupakan tindakan rasional dari pemerintah sebagai wakil negara yang mempertimbangkan untung dan rugi dalam mencapai suatu tujuan. Logikanya, tidak ada kerja sama yang tidak menguntungkan. Sekecil-kecilnya keuntungan akan lebih berguna jika

dibandingkan dengan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Jadi, kesempatan di forum dan organisasi manapun, apabila beberapa negara bisa bergabung maka Indonesia tidak segan untuk mengikutinya.

Tujuan Indonesia yang ingin dicapai sama dengan negara pada umumnya yaitu untuk mewujudkan kepentingan dalam negeri. Perwujudan kepentingan harus dipertimbangkan dengan strategi yang dirancang dengan tindakan penuh tanggung jawab dan bukan hanya karena untung-untungan. Seperti definisi John Lovell, yaitu: Strategi adalah serangkaian langkah-langkah (*moves*) atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam suatu situasi kompetitif, dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan.<sup>49</sup>

Proses memperhitungkan strategi yang akan digunakan harus sesuai dengan aturan yang berlaku demi citra baik negara-bangsa. Perhitungan ini harus sesuai dengan kondisi dan kebijakan politik didalam maupun luar negeri. Pada pelaksanaan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama, ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasional melalui berbagai forum kerja sama dan perantara rezim internasional. Selain dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional, politik luar negeri Indonesia tertuju pada proyeksi sistem nilai (*value*) di tingkat nasional, yang sering menguat secara tidak terduga, yang dipengaruhi oleh politik dalam negeri. Pelaksanaan kepentingan tersebut dapat dimulai dengan langkah-

---

<sup>49</sup> Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional "Tingkat Analisis dan TEORISASI"*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989 halaman 90

langkah strategis Indonesia di lingkungan regional sebelum memasuki kawasan internasional. Kestabilan dan keamanan regional mendapat nilai lebih apabila posisinya strategis dan penting bagi pengaruh ekonomi-politik internasional.

Langkah yang dilakukan adalah bergabungnya Indonesia dalam rezim ekonomi internasional, yang dikenal dengan sebutan WTO. Kebijakan Indonesia dalam usahanya terus-menerus terlihat dalam integrasi ekonomi merupakan kebijakan yang ditujukan untuk memperluas ekonomi khususnya dalam perdagangan baik nasional maupun internasional. Konsekuensi atas masuknya Indonesia dalam WTO sangat jelas, yaitu secara konsisten harus meliberalisasi perekonomian dalam negeri sesuai dengan mandat yang diberikan oleh WTO.<sup>50</sup>

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO memang memiliki nilai plus dan minus. Nilai plusnya, barang-barang produksi dan kebutuhan dalam negeri didapat dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO. Nilai minusnya adalah negara berada pada aturan-aturan yang dibuat WTO dan terbilang ketat. Namun apabila Indonesia tidak bergabung, pendapatan negara yang berasal dari perdagangan internasional akan berkurang bahkan terputus karena hambatan dan peraturan dari WTO. Hambatan tersebut dapat berupa larangan-larangan untuk non-anggota berupa akses pasar dan pemasaran produk ekspor dan pemenuhan barang impor serta embargo. Larangan-parangan tersebut dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan politik negara,

---

<sup>50</sup> Budi Winarno, "Globalisasi Rezim Demokrasi Poliarki : Kebijakan Integrasi Ekonomi Indonesia", Jurnal Hubungan Internasional Vol.2, Yogyakarta, 2012 halaman 184



khususnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan dan berkurangnya devisa negara. Pentingnya bergabung dalam rezim internasional dalam meningkatkan sektor kinerja perdagangan dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas produk dalam negeri sesuai standar, menjadi langkah Indonesia untuk turut meramaikan pasar internasional.

WTO menjadi payung perdagangan di dunia, dimana Indonesia dan Afrika Selatan adalah salah satu contoh bentuk kerja sama bilateral di bidang ekonomi yaitu ekspor dan impor. Perdagangan internasional dengan kebebasan yang dikeluarkan oleh WTO, yaitu perdagangan bebas dengan menghilangkan hambatan-hambatannya, semakin mempermudah gerak dan ruang Indonesia dan Afrika Selatan dalam bekerja sama. Kerja sama tersebut membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia khususnya Asia dan Afrika.

Peran WTO dalam perdagangan bebas ditunjukkan dengan terbentuknya organisasi-organisasi perdagangan dunia, yang memudahkan proses ekspor dan impor antar negara. Salah satunya adalah realisasi kerja sama antara Indonesia dan Afrika Selatan, yang diperkuat sebagai tindak lanjut dari kunjungan NAFCOC saat *Trade Expo Indonesia* pada Oktober 2012 lalu. Tujuan kedatangan Delegasi misi ekonomi Afrika Selatan, yang terdiri dari unsur pemerintah *Eastern Cape Province* dan kalangan dunia usaha *National African Federated Chamber of Commerce (NAFCOC)*

ini adalah memperkenalkan potensi perdagangan dan investasi yang dimiliki.<sup>51</sup> Membuka dan memperkenalkan potensi dari masing-masing membuka kanal kegiatan ekspor dan impor baru antar negara, yang menjadi salah satu bukti adanya peningkatan hubungan kerja sama. Peningkatan ini bertambah dengan adanya kunjungan Afrika Selatan pada tahun 2013, sebagai misi untuk urusan bisnis dengan pelaku usaha di daerah-daerah seperti Batam dan meninjau kawasan industri Jababeka di Jawa Barat.<sup>52</sup>

Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia mempertegas bahwa sepuluh negara dari Asia dan Afrika tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dan tak ada satupun yang berasal dari negara Barat.<sup>53</sup> Indonesia dan Afrika Selatan menjadi perwakilan dari masing-masing benua, yang merupakan bukti bahwa rezim internasional dapat memberikan kesan dan hasil yang baik apabila negara mampu memanfaatkan WTO sebagai payung perdagangan. Selama peraturan dan ketentuan ditaati dan produktivitas produk dalam negeri dapat bersaing dengan negara lain, peluang semakin terbuka lebar untuk Indonesia terutama memperluas jangkauan perdagangan. Semakin lebar jangkauan Indonesia, devisa negara akan semakin bertambah dan kepentingan-kepentingan dalam negeri dapat terlaksana. Sehingga

---

<sup>51</sup> SINDO, Indonesia-Afsel akan Perkuat Kerja sama Ekonomi, <http://ekbis.sindonews.com/read/728142/34/> diakses pada 28 November 2015

<sup>52</sup> SINDO, Indonesia-Afsel akan Perkuat Kerja sama Ekonomi, <http://ekbis.sindonews.com/read/728142/34/> diakses pada 28 November 2015

<sup>53</sup> Eddi Santosa, Dubes : Ini Era Baru Kerja sama Perdagangan Multilateral RI-Afrika, [m.detik.com/finance/read/2013](http://m.detik.com/finance/read/2013) diakses pada 26 November 2015

kesejahteraan bersama dalam pembangunan negara berupa fasilitas infra struktur dan supra struktur serta pelunasan hutang luar negeri bukan menjadi hal yang mustahil.

Prinsip-prinsip WTO merupakan pedoman suatu negara untuk bekerja sama dengan negara lain. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kepentingan masing-masing negara, terutama untuk mengukur keputusan tentang strategi lawan dan perkiraan tentang kemampuan sendiri.<sup>54</sup> Sikap ini ditunjukkan agar kepentingan Indonesia tidak berbenturan Afrika Selatan, yang dapat memicu konflik di antara keduanya.

Berbagai macam strategi diambil oleh negara untuk bertindak dalam memutuskan kebijakan dan sikap dengan negara lain. Hal ini bertujuan agar kepentingan yang dicapai sesuai dengan prioritas kepentingan nasional. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk satu negara saja. Keadaan negara sendiri yang menerapkan prinsip-prinsip saling menguntungkan menjadikan respon negara lain semakin positif. Seperti contoh hubungan kerja sama Indonesia dan Afrika Selatan di bidang ekonomi dan politik. Afrika Selatan memiliki pasar potensial dan perekonomian yang stabil, begitu juga Indonesia yang memiliki beberapa keunggulan, ditunjukkan oleh pertumbuhan pada bidang ekonomi dan politik. Ini merupakan salah satu faktor yang menarik masing-masing negara untuk memulai kerja sama. Prinsip-prinsip yang digunakan berasal dari WTO, yang sifatnya wajib diterapkan sebagai tindakan rezim internasional dalam rangka mengatur negara-negara anggotanya. Prinsip yang

---

<sup>54</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional-Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990 halaman 190

dijelaskan adalah *Most-Favorited-Nations* (MFN), *Transparency* (Transparan) dan *Reciprocity* (Hubungan Timbal Balik).

Adapun prinsip-prinsip hubungan timbal-balik yang digunakan Indonesia sebagai strategi politiknya yaitu :

#### **A. Prinsip *Most-Favorited-Nations* (MFN)**

Prinsip MFN ini termuat dalam Pasal 1 GATT/WTO. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskriminatif.<sup>55</sup> Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya dengan perlakuan sama dalam pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor serta menyangkut biaya-biaya. Termasuk kebijakan ekspor dan impor Indonesia ke Afrika Selatan. Meskipun dominasi pasar belum dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia, namun perlakuan sama yang tidak menerapkan syarat tertentu harus dijalankan segera tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau diajukan kepada sesama anggota WTO. Begitupun di Indonesia, produk impor yang berasal dari Afrika Selatan harus diperlakukan sama tanpa membedakan dari mana asal barang tersebut.

Indonesia yang bermula memiliki sifat lebih tertutup dengan dunia, khususnya negara-negara barat, menjadi lebih terbuka seiring dengan perdagangan bebas. Keterbukaan Indonesia dipengaruhi oleh politik luar negeri yang bebas dan aktif dan

---

<sup>55</sup> Yolanda Rizka, Kelembagaan Perdagangan Internasional, [yolanda-rizka-fisip11.web.unair.ac.id/artikel](http://yolanda-rizka-fisip11.web.unair.ac.id/artikel) diakses pada 13 November 2015

prinsip-prinsip yang diterapkan WTO. Politik dan prinsip tersebut berpengaruh pada kebijakan ekonomi dari pemerintah yang tujuannya bukan hanya meliputi perumusan kepentingan negara dan untuk menjaga kewibawaan negara di mata dunia, melainkan adalah bagaimana memenuhi kepentingan nasional.<sup>56</sup> Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi dengan sifat terbuka bagi negara lain yang ingin menjalin kerja sama dan tidak diskriminasi. Selain itu, pemerintah mengerahkan segala cara terutama dalam mengembangkan pasar ekspor ke Afrika Selatan melalui forum-forum kerja sama dan pameran dagang serta memanfaatkan berbagai kesempatan untuk memperluas jaringannya. Hal ini tentunya berasal dari kebijakan yang diambil pemerintah. Tanpa adanya kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan politik luar negeri oleh pemerintah dan prinsip-prinsip WTO terkait interaksi antar negara, perluasan jaringan tidak dapat terealisasi. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa hanya karena nilai ekspor dan impornya lebih tinggi dari negara lain atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya.

Selain itu, non diskriminasi diterapkan pada barang ekspor dan impor yang harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri. Langkah-langkah pemerintah dalam menentukan kebijakan ekspor didasarkan pada standar kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Kualitas yang dimaksud adalah dengan menetapkan standar produk dengan negara-negara lain namun memiliki khas dari negara sendiri seperti Standar Nasional Indonesia. Pada produk makanan biasanya ditambahkan dengan

---

<sup>56</sup> Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia "Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2011 halaman 135

label Badan POM dan nomornya serta penetapan pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan pada kuantitas, Indonesia mengembangkan teknologi sederhana untuk memperoleh hasil yang maksimal dan mutu dengan standar yang mampu bersaing. Inilah yang menjadi faktor penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan semakin baik pada periode 2010-2014. Keuntungan dari prinsip tersebut, Indonesia dapat memasarkan produk ekspornya secara bebas tanpa diskriminasi. Kerugiannya yaitu apabila produk impor yang masuk lebih bermutu, dengan harga lebih bersaing. Sehingga justru mengalahkan produk dalam negeri.

### **B. *Transparency* (Transparan)**

Prinsip transparan dalam WTO merupakan sikap terbuka yang ditunjukkan dengan cara mempublikasikan aturan dagang masing-masing negara tanpa ada yang ditutupi agar dapat ditinjau.<sup>57</sup> Sikap transparan dibutuhkan guna memantau jalannya perdagangan internasional antara negara satu dengan negara lain agar sesuai dengan aturan WTO. Perhatian mengenai transparansi pada interaksi antara fenomena politik dan ekonomi perlu ditingkatkan. Oleh karena perekonomian saat ini bukan hanya negara saja yang menjadi aktor, pengusaha dan pemilik modal pun memiliki kontribusi yang besar serta berkesempatan dalam kedudukan yang setara dengan perekonomian yang diatur pemerintah. Pengarahan dan komunikasi pemerintah dengan aktor-aktor non-negara menjadi hal yang sangat penting dalam mengatur

---

<sup>57</sup> Yolanda Rizka, Kelembagaan Perdagangan Internasional, [yolanda-rizka-fisip11.web.unair.ac.id/artikel](http://yolanda-rizka-fisip11.web.unair.ac.id/artikel) diakses pada 13 November 2015

ketertiban perdagangan. Aktor non negara bukan sebagai perimbangan ataupun penentu ekonomi seberapa besar dan kecilnya modal usaha yang dimiliki. Aktor non negara tersebut merupakan salah satu bagian dari konstelasi ekonomi dan politik Indonesia. Selain itu, keaktifan dan komunikasi internasional negara perlu ditingkatkan untuk memajukan sistem ekonomi dan politik negara yang memiliki alur sama dalam proses penentuan kebijakan negara, terutama dalam bidang ekspor dan impor.

Prinsip transparan ini berguna untuk prospek hubungan ekonomi dan politik antara Indonesia dan Afrika Selatan. *Join trade commission* menjadi topik bahasan pada tahun 2013.<sup>58</sup> Kegiatan tersebut merupakan upaya meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral kedua negara, yang merupakan upaya diplomasi Indonesia ke saat wilayah Afrika, khususnya Afrika Selatan yang menjadi prioritas peningkatan komoditas perdagangan internasional.<sup>59</sup> Perjanjian ini dinilai cukup menjanjikan dan didorong adanya modal politik Indonesia dan Afrika Selatan. Ini merupakan prospek yang cerah bagi Indonesia, mengingat cukup kuatnya landasan kerja sama yang ada dan persetujuan antara kedua negarayang saling berkunjung dan menambah jenis komoditi secara transparan. Sikap transparan ini ditunjukkan Indonesia dalam Undang-undang No.25 tahun 2007 dalam membuka pasarnya terhadap barang dan

---

<sup>58</sup> Asmin Nasution, Penerapan Prinsip Transparansi, *repository.usu.ac.id/handle* diakses pada 30 Desember 2015

<sup>59</sup> Kemendag, Indonesia-Afrika Selatan Agendakan Pertemuan Komisi Perdagangan, *www.kemendag.go.id* diakses pada 26 November 2015

jasa-jasa asing untuk Afrika Selatan.<sup>60</sup> Adanya transparansi ini akan menjamin keamanan perdagangan kedua negara tersebut. Prinsip tersebut diterapkan terutama pada kebijakan yang mendukung akses pasar di bidang ekspor dan impor agar negara anggota WTO untuk konsisten menyalurkan kebijakan perdagangannya terhadap ketentuan-ketentuan WTO. Indonesia dan Afrika Selatan selaku anggota WTO berkewajiban untuk menyampaikan laporan kebijakan perdagangannya setiap 4 tahun sekali.<sup>61</sup>

Keuntungan dari prinsip tersebut yaitu Indonesia memperoleh informasi terkait peluang di Afrika Selatan dan negara-negara lain karena setiap negara harus melaporkan secara transparan tentang salah satu kepentingannya. Kerugiannya adalah Indonesia juga harus bersedia untuk menyebarkan salah satu informasi tentang negaranya di bidang ekspor dan impor berupa pendapatan dan kerugian yang didapat.

### **C. *Reciprocity* (Hubungan Timbal Balik)**

Dalam hubungan ekonomi-politik, resiprositas diartikan sebagai hubungan timbal balik atas dasar saling menguntungkan.<sup>62</sup> Hubungan timbal balik ini berfungsi sebagai kontrol agar negara dapat memenuhi kebutuhan masing-masing tanpa merugikan negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan dasar negara didasarkan pada

---

<sup>60</sup> Asmin Nasution, Penerapan Prinsip Transparansi, *repository.usu.ac.id/handle* diakses pada 30 Desember 2015

<sup>61</sup> Kemendagri, *Negara Anggota WTO Sambut Positif Kebijakan Perdagangan Indonesia*, kemendagri.go.id diakses 13 November 2015

<sup>62</sup> Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional "Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatahan Dunia"*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993 halaman 229



tantangan ekonomi dunia yang semakin berkembang. Tantangan tersebut dapat dilalui apabila kebutuhan negara diatur oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Kebijakan tersebut diperoleh dari keputusan para perencana ekonomi yang tetap mengedepankan tujuan utama negara dalam mensejahterakan rakyat.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia, diiringi dengan pertumbuhan infra struktur dan supra struktur yang memadai. Hal ini sesuai dengan arahan prioritas negara dalam mengupayakan kestabilan ekonomi dan politik menjadi satu kesatuan kepentingan dalam negeri. Pencapaian ini menjadi jawaban dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi globalisasi. Terlebih pada era globalisasi ini, perkembangan dan perubahan ekonomi domestik menjadi tolak ukur stabilitas negara apabila negara tidak mampu menindaklanjuti hambatan yang terjadi. Saat ini tidak hanya negara, melainkan aktor non-negara yang dapat mempengaruhi pola relasi ekonomi antar negara, begitu pula pelaku ekonomi dapat berpengaruh.<sup>63</sup> Maka dari itu indikator kepentingan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur kekuatan politik Indonesia di tingkat internasional.

Hubungan timbal balik ini ditunjukkan dengan pertumbuhan di bidang ekspor dan impor antara Indonesia dan Afrika Selatan. Sebelum Indonesia menerapkan prinsip-prinsip WTO dengan baik, pada tahun 2009 nilai ekspor Indonesia ke Afrika Selatan hanya mencapai USD 485 juta dan impor Indonesia dari Afrika Selatan

---

<sup>63</sup> Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia "Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2011 halaman 85

mencapai sebesar USD 350 juta.<sup>64</sup> Setelah strategi Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip WTO diterapkan dengan baik, pertumbuhan ekspor dan impor semakin tumbuh. Nilai ekspor Indonesia ke Afrika Selatan pada tahun 2014 tumbuh menjadi USD 1,38 Miliar. Keuntungan ini juga dirasakan Afrika Selatan, yaitu ekspor ke Indonesia (impor Indonesia dari Afrika Selatan) di tahun 2014 menjadi sebesar USD 420,44 juta, yang pada tahun 2009 hanya mencapai USD 350 juta.<sup>65</sup> Sedangkan peluang pasar yang masih belum terdominasi masih besar yaitu diatas 31,3% di tahun 2010.<sup>66</sup>

Komoditi ekspor utama Indonesia ke Afrika Selatan mulanya hasil olahan kelapa sawit, mebel (*furniture*), tekstil, dan kerajinan tangan. Sedangkan Indonesia mengimpor bubur kayu, bahan kimia industri dan logam dasar. Pada tahun-tahun berikutnya tercatat adanya bentuk kerja samabaruu di bidang yang disambut dengan baik oleh kedua pihak yaitu di bidang kelautan dan perikanan, alumunium, produk teknologi, daging sapi dan ternak.<sup>67</sup> Pertumbuhan tersebut diiringi dengan politik dalam negeri yang semakin membaik dan mengarah pada kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia guna menghadapi kecenderungan pasar ekonomi global. Dengan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan tersebut, maka Indonesia dan Afrika Selatan sama-sama mempertahankan hubungan baiknya dan menambah kerja sama di bidang-bidang baru lainnya.

<sup>64</sup> Badan Pusat Statistik, *Bps.go.id* diakses pada 10 November 2015

<sup>65</sup> Badan Pusat Statistik, *Bps.go.id* diakses pada 10 November 2015

<sup>66</sup> HIS Global Insight, *www.treasury.gpg.gov.za* diakses 20 Desember 2015

<sup>67</sup> Puskita, KKP Diversifikasi Pasar Ekspor ke Timur Tengah dan Afrika, <http://puskita.kkp.go.id> diakses pada 13 Agustus 2015

### 1. Motif Indonesia Mempertahankan Kerja sama dengan Afrika Selatan

Didalam hubungan internasional, suatu negara sudah pasti memiliki motif atau kepentingan dibalik kerja sama yang disepakati. Kepentingan tersebut merupakan salah satu pendorong terselenggaranya hubungan bilateral. Kepentingan negara muncul karena kewajiban dan kebutuhannya untuk memenuhi kepentingan dalam negeri. Kepentingan tersebut dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan negara. Kepentingan Indonesiayaitu melihat dan mencoba untuk mengenal Afrika Selatan sebagai destinasi turis internasional dan tempat untuk mencari berbagai kebutuhan dalam negeri. Selain itu, Afrika Selatan memiliki letak strategis dengan peluang pasar yang tidak kalah saing di wilayah Afrika. Seiring dengan kebutuhan dan kepentingannya setiap tahun, kunjungan pelaku bisnis Afrika Selatan semakin meningkat ke Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu faktor bagi Indonesia mempertahankan kerja sama dengan Afrika Selatan.

Secara keseluruhan, perekonomian Afrika Selatan didukung oleh kerja sama perdagangan internasional, yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya ditandai dengan kenaikan neraca perdagangan Afrika Selatan terhadap Indonesia pada periode Januari hingga November 2014.<sup>68</sup> Pada periode tersebut, ekspor tidak terus menerus naik. Setelah mengalami penurunan, ekspor Indonesia tumbuh lagi secara perlahan. Sedangkan secara perlahan angka impor ke Afrika Selatan mengalami pertumbuhan dan penurunan.

---

<sup>68</sup> Bappenas, *E-Book Evaluasi Paruh Waktu RPJMN*, <http://www.bappenas.go.id/files> diakses pada 9 Maret 2015

Afrika Selatan merupakan mitra kerja bagi Indonesia dengan sumber daya yang melimpah sebagai alternatif pasar selain Eropa. Selain itu, peluang yang dapat dimanfaatkan yaitu peluang ekspor, dimana Afrika Selatan menjadi jembatan untuk memasarkan produk-produk dan jasanya ke pasar Afrika dan negara-negara Afrika lainnya. Dengan pertumbuhan ekonomi-politik internasional Afrika Selatan yang cukup stabil, Indonesia memanfaatkan kondisi ini untuk mempertahankan kerja sama, agar barang dan jasa yang ditawarkan dapat memasuki pasar Afrika Selatan dan menjadi sumber devisa negara.

## 2. Peluang Indonesia Melihat Pasar Potensial Afrika Selatan

Pasar potensial Afrika Selatan akan terus dimanfaatkan Indonesia melalui berbagai macam bidang dengan cara melipat gandakan ekspor dengan memperluas jangkauan pasar. Salah satunya adalah membidik wilayah-wilayah jalur perdagangan sebagai jalan yang dapat dilalui untuk memasuki Afrika, khususnya pasar Afrika Selatan.

Nilai ekspor Indonesia ke Afrika Selatan tercatat sebesar 0,15% dari pendapatan keseluruhan ekspor sebesar USD 888,5 Miliar. Data dari Kementerian Perdagangan Indonesia menunjukkan nilai ekspor non migas ke Afrika Selatan sebesar USD 1,38 Miliar dan ekspor Afrika Selatan ke Indonesia mencapai USD

420,44 juta di tahun 2014.<sup>69</sup> Hal tersebut membuat posisi Afrika Selatan menjadi salah satu negara termaju untuk wilayah Afrika.<sup>70</sup> Selain itu, Afrika Selatan memiliki letak yang strategis sebagai pintu masuk ke negara tetangga seperti Zimbabwe, Botswana, Lesotho, dan Swaziland untuk menjadikannya sebagai pasar potensial. Seperti halnya negara lain yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam dan Amerika Serikat telah membaca potensi pasar Afrika Selatan. Dengan dasar itu, pemerintah mengupayakan segala cara untuk tetap bersaing di negara tersebut. Duta Besar Indonesia untuk Afrika Selatan, Lesotho, Swaziland dan Botswana, Suprpto Marosoetomo, menghimbau pelaku usaha Indonesia agar memanfaatkan pasar yang masih terbuka lebar di Afrika Selatan untuk peluang investasi dan perdagangan.<sup>71</sup>

Produk potensial ekspor Indonesia yang diminati Afrika Selatan diantaranya perhiasan, otomotif, kerajinan, kakao dan sawit.<sup>72</sup> Produk-produk tersebut hanya sebagian dari komoditi utama Afrika Selatan. Sedangkan produk utama yang diminati yaitu karet, mebel (*furniture*), kopi dan alas kaki. Peluang ekspor yang bermula terbatas menjadi semakin terbuka lebar dengan adanya prinsip-prinsip WTO yang diterapkan Indonesia dalam ekspor dan impor ke Afrika Selatan. Komoditi yang

---

<sup>69</sup> [Tabloiddiplomasi.org](http://Tabloiddiplomasi.org) diakses pada 10 November 2015

<sup>70</sup> Akbar Buwono, Pengusaha Indonesia Diminta Jejak Peluang Investasi di Afrika Selatan, [Beritadaerah.co.id/2015/03/25](http://Beritadaerah.co.id/2015/03/25) diakses pada 10 November 2015

<sup>71</sup> Akbar Buwono, Pengusaha Indonesia Diminta Jejak Peluang Investasi di Afrika Selatan, [Beritadaerah.co.id/2015/03/25](http://Beritadaerah.co.id/2015/03/25) diakses pada 10 November 2015

<sup>72</sup> Kemendag, 10 Komoditi Potensial dan Utama, [kemendag.go.id](http://kemendag.go.id) diakses 9 Oktober 2015

masih belum diekspor dan masih terbuka untuk Indonesia diantaranya obat-obatan, produk hasil kelautan dan perikanan, kosmetik, produk kulit serta produk pertanian.<sup>73</sup>

Jalur kerja sama Indonesia-Afrika Selatan memang telah berjalan sejak lama. Dan, pasar potensial Afrika Selatan sampai saat ini belum ada yang mampu untuk mendominasi. Keuntungan yang didapat lebih banyak diminati para pengusaha Indonesia untuk mempertahankan eksponya. Diplomasi yang baik terus dijalankan oleh pemerintah. Respon baik yang diberikan Afrika Selatan terhadap barang yang masuk ke negaranya menjadi sebuah peluang untuk mempererat hubungan diplomasi di antara keduanya. Dengan respon diplomasi yang baik dan bermutu tinggi, pemerintah dapat memperoleh sumber-sumber kekuatan nasional yang tersembunyi dari Afrika Selatan. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan untuk menjamin kepentingan politik Indonesia di pasar Afrika Selatan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2010-2014. Angka tersebut masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik diiringi dengan kondisi politik Indonesia yang tetap stabil. Kenaikan dan penurunan tersebut wajar dialami setiap negara. Meskipun mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir, hasil tersebut tidak mempengaruhi kondisi politik secara signifikan. Selain itu, turunnya angka persentase pertumbuhan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi Indonesia untuk menambah hubungan dengan negara lain khususnya di bidang ekspor. Perbaikan-

---

<sup>73</sup> Kemendag, 10 Komoditi Potensial dan Utama, *kemendag.go.id* diakses 9 Oktober 2015

perbaikan juga terus dilakukan pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya di dunia internasional. Kondisi yang dialami Indonesia harusnya menjadi kesempatan pemerintah untuk bekerja keras dalam meningkatkan hubungan ekspor dan impor dengan negara lain agar menaikkan sumber pendapatan negara.

Keuntungan Indonesia dan Afrika Selatan bergabung di rezim internasional yaitu kedua negara saling mendapatkan kebebasan untuk eksplorasi pasar. Kedua negara dapat memasarkan produk ekspor dan memilih impor sesuai kebutuhan, menambah kerja sama dengan negara lain berupa hubungan bilateral maupun aliansi dan menambah devisa negara. Kerugiannya adalah negara anggota rezim, tak terkecuali Indonesia dan Afrika Selatan, harus terkekang dengan aturan-aturan yang diberlakukan WTO. Hal tersebut di satu sisi menguntungkan, namun di sisi lain, kedaulatan negara menjadi terpengaruh karena aturan tersebut membatasi tindakan negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya.

Usaha yang dilakukan adalah dengan aktif dalam forum dan kegiatan yang berbasis internasional. Dengan kerja keras dan usaha yang tak henti, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi salah satu negara kuat di bidang ekonomi maupun politiknya. Hal ini seharusnya menjadi pemacu bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem kinerja dalam meningkatkan kualitas bangsa, agar kedepannya Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi dan keadaan politik yang semakin stabil.

Berikut adalah Lambang Negara, dimana Afrika Selatan memiliki Perwakilan Diplomatik di Indonesia, yang merupakan bukti bahwa keduanya memiliki hubungan kerja sama yang baik.

**Gambar 4.1**

**Lambang Negara, Globe dan Bendera pada Laman Website Kedutaan Besar Afrika Selatan untuk Indonesia (dari kiri)<sup>74</sup>**



<sup>74</sup> Government of South Africa in Indonesia, Logo, [www.dirco.gov.za](http://www.dirco.gov.za) diakses pada 19 November 2015